



GRAHA ILMU

# Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik

Peluang dan Tantangan

Editor:

**Laode Muhammad Fathun**

**Rika Isnarti**

**TINJAUAN MULTIPERSPEKTIF KAWASAN INDO-PASIFIK: Peluang dan Tantangan**

oleh Rizky Hikmawan, Rodon Pedrason, Yugolastarob Komeini, Rizky Ridho Pratomo, Afrimadona, Hesti Rosdiana, Beni Sukadis, Putu Agung Nara Indra Prima Satya, Nur Rachmat Yuliantoro, Emil Radhiansyah, Isti Marta Sukma, Anak Agung Banyu Perwita, Laode Muhamad Fathun, Asep Kamaluddin Nashir, Rika Isnarti

Editor: Laode Muhamad Fathun; Rika Isnarti

Kata Sambutan oleh: Prof. Aleksius Jemadu, PhD.; Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si.; Prof. Dr. Bambang Cipto, MA.; Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A.; Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.; Prof. Dr. Arry Bainus, M.A.; Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

Hak Cipta © 2021 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2021



**GRAHA ILMU**

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; email: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-912-3

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

**DATA BUKU:**

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xxx + 268; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



## Kata Pengantar

**A**ssalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh para pembaca buku ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara(i) telah membaca buku ini. Harapan kami para pembaca yang budiman dapat mendapatkan pengetahuan dari buku ini. Kami informasikan bahwa buku ini merupakan kelanjutan dari buku kami sebelumnya yang berjudul 'Indonesia dan Keamanan Kontemporer di Asia Tenggara ' Tahun 2018 Sulu Media Graha Ilmu. Buku ini merupakan komposisi baru dengan penulis baru dengan harapan baru. Buku ini terdiri atas sebelas Bab dengan jumlah lima belas orang penulis. Buku ini berjudul Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik : Peluang dan Tantangan. Tentunya buku ini menyediakan analisis komprehensif para penulis dari bidang kajian masing-masing yang telah malang melintang dalam dunia riset dan publikasi. Oleh sebab itu bagi pengkaji Hubungan Internasional kontemporer terkhusus wilayah Asia Pasifik, ASEAN dan sekitarnya, akan sangat dianjurkan untuk memiliki buku ini. Penulis dengan judul Kawasan Indo-Pasifik: Menuju Sebuah Regionalisme Baru ? ditulis oleh Rizky Hikmawan, kajian ini menuliskan bahwa kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan regionalisme baru yang menyediakan potensi sumber daya yang luar biasa dalam membangun masa depan negara dan kawasan dalam percaturan politik internasional kontemporer. Regionalisme ini menyediakan pertarungan banyak negara, banyak budaya dan banyak kepentingan untuk berkuasa. Penulis dengan judul Kawasan Indo-Pasifik dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategis oleh Rodon Pedrason dan Yugolastarob Komeini, penulis melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan lingkungan strategis baru akan menyediakan gaya politik dan militer baru. Negara-negara akan saling memetakan siapa yang akan menjadi kawan dan berpotensi menjadi lawan. Penulis Perkembangan Politik Internasional di Kawasan Indo-Pasifik oleh Rizky Ridho Pratomo dan Afrimadona, penulis menilai bahwa kontestasi politik internasional

di kawasan Indo-Pasifik akan semakin memanas. Memanas dalam arti bukan hanya karena kontestasi regional sekitarnya seperti ASEAN dan Asia Pasifik tetapi masuknya negara-negara seperti Amerika, China dan India. Perebutan kekuasaan dalam memperluas pengaruh di kawasan ini akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan rivalitas multi kepentingan. Penulis Keamanan Maritim di Kawasan Indo-Pasifik oleh Hesti Rosdiana. Penulis menilai bahwa kawasan Indo-Pasifik akan menyediakan konflik rivalitas yang berhubungan dengan keamanan maritim. Penulis melihat bahwa kawasan potensial ini akan berpeluang terjadinya konflik wilayah antar negara anggota. Apalagi para anggota memang secara historis memiliki beban konfliktual di kawasan regional lain. Penulis Diplomasi Pertahanan di Kawasan Indo-Pasifik oleh Beni Sukadis. Penulis melihat bahwa potensi konflik diantara negara-negara kawasan sangat besar. Oleh sebab itu, untuk mencegah adanya hegemoni kekuasaan dan ketidak saling percaya maka negara-negara harus membuka diri berdialog untuk meyakinkan bahwa diantara mereka tidak akan saling serang dan menyerang. Apalagi diam-diam membangun pertahanannya. Penulis Peran India dalam Strategi Keamanan Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik oleh Putu Agung Nara. Penulis melihat bahwa peran India sebagai salah satu negara yang sedang 'naik daun' tentunya memiliki peran khusus dalam strategi keamanan Amerika Serikat. Munculnya China sebagai kekuatan baru di kawasan regional menuntut negara harus mencari kawan untuk beraliansi melawan kekuatan baru tersebut. Hubungan baik India dan Amerika Serikat yang terus berkembang, bisa dijadikan upaya untuk membendung kekuatan China. Apalagi masing-masing negara memiliki beban konflik masa lalu. Penulis China dan Kawasan Indo-Pasifik: Reaksi, Kebijakan, dan Tantangan Keamanan oleh Nur Rachmat Yulianto. Penulis melihat bahwa China berpotensi menjadi kekuatan besar dimasa depan. Kebijakan Belt Road Initiative sebagai formulasi kebijakan luar negeri China merupakan reaksi atas tantangan kawasan. Rivalitas dan tantangan konflik dengan negara-negara besar tidak menyurutkan niat China untuk menggantikan posisi Amerika sebagai negara superpower. China yang semakin agresif tentunya sebagai bentuk reaksi atas respons untuk tetap bertahan dalam politik internasional. Penulis India dan Strategi di Kawasan Indo-Pasifik oleh Emil Radhuansyah. Penulis menilai bahwa India juga berpotensi menjadi kekuatan besar yang mampu menyaingi China. Rivalitas dan konflik



diantara kedua negara dimasa lalu bisa menjadi beban yang akan dibawa di kawasan Indo-Pasifik. Karakter kebijakan pemimpin India yang juga cenderung agresif, siap menantang China untuk menjadi kekuatan besar di Asia maupun dunia. Penulis Respon Strategi Pertahanan Maritim Australia Terhadap Modernisasi Militer China di Kawasan Indo- Pasifik oleh Isti Marta Sukma dan Anak Agung Banyu Perwita. Penulis menilai bahwa Australia merupakan negara yang juga merasa terganggu dengan modernisasi alusista militer China. China menjadi ancaman bukan hanya Amerika dan India, tetapi Australia juga turut merespon munculnya kekuatan baru oleh China. Australia harus memperkuat aliansi dan pertahanan militernya. Kemudian, penulis Kebijakan Politik Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik oleh Laode Muhamad Fathun dan Asep Kamaluddin. Penulis melihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap diarahkan pada bebas aktif. Indonesia harus menjadi karakter *middle power* yang mampu mengimbangi kekuatan baru di kawasan. Indonesia sebagai salah satu penggagas Indo-Pasifik harus mampu menjadi teman bagi siapapun. Oleh sebab itu dengan strategi diplomasi akomodasi Indonesia harus bisa mencari posisi terbaik yang menguntungkan kepentingan nasional. Dan Terakhir adalah penulis Strategi Taiwan dalam Meningkatkan *soft power* di Kawasan Indo-Pasifik oleh Rika Isnarti. Penulis melihat majunya China sebagai kekuatan baru di kawasan menuntut Taiwan harus terus waspada dalam menilai modernisasi China. Taiwan dan China sejak dahulu telah memiliki beban konflik yang akut. Oleh sebab itulah dengan strategi *soft power* merupakan upaya Taiwan dalam pencari aliansi agar bisa melawan agresifitas China di kawasan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi pembaca. Kami menyadari masih banyak kekurangan dari buku ini. Oleh sebab itulah, mewakili para penulis kami akan terus menyempurnakan kajian kami agar bisa terus dinikmati oleh masyarakat. Salam Hormat Kami. Wassalam.

Jakarta, 20 Februari 2021

Editor

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Kata Sambutan</b>	ix
<b>Daftar Singkatan</b>	xix
<b>Daftar Isi</b>	xxiii
<b>Daftar Gambar</b>	xxv
<b>Daftar Tabel</b>	xxvii
<b>Daftar Grafik</b>	xxix
<b>1 Kawasan Indo-Pasifik: Menuju Sebuah Regionalisme Baru?</b>	1
<i>Rizky Hikmawan</i>	
<b>2 Kawasan Indo-Pasifik dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi</b>	23
<i>Rodon Pedrason dan Yugolastarob Komeini</i>	
<b>3 Perkembangan Politik Internasional di Kawasan Indo-Pasifik</b>	37
<i>Rizky Ridho Pratomo &amp; Afrimadona</i>	
<b>4 Keamanan Maritim di Kawasan Indo-Pasifik</b>	61
<i>Hesti Rosdiana</i>	
<b>5 Diplomasi Pertahanan di Kawasan Indo Pasifik</b>	81
<i>Beni Sukadis</i>	
<b>6 Peran India dalam Strategi Keamanan Amerika Serikat di Kawasan Indo Pasifik</b>	105
<i>Putu Agung Nara Indra Prima Satya</i>	
<b>7 China dan Kawasan Indo-Pasifik: Reaksi, Kebijakan, dan Tantangan Keamanan</b>	125
<i>Nur Rachmat Yuliantoro</i>	

<b>8</b>	<b>India dan Strategi di Kawasan Indo-Pasifik</b>	<b>149</b>
	<i>Emil Radhiansyah</i>	
<b>9</b>	<b>Respon Strategi Pertahanan Maritim Australia Terhadap Modernisasi Militer China di Kawasan Indo-Pasifik</b>	<b>179</b>
	<i>Isti Marta Sukma dan Anak Agung Banyu Perwita</i>	
<b>10</b>	<b>Kebijakan Politik Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik</b>	<b>213</b>
	<i>Laode Muhamad Fathun dan Asep Kamaluddin Nashir</i>	
<b>11</b>	<b>Strategi Taiwan Meningkatkan Soft Power di Kawasan Indo-Pasifik</b>	<b>237</b>
	<i>Rika Isnarti</i>	
	<b>Daftar Indeks</b>	<b>261</b>



# 8

## India dan Strategi di Kawasan Indo-Pasifik

Emil Radhiansyah

*Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina*

*'Some appreciation of Indian historical forces will show beyond doubt, that whoever controls the Indian Ocean has India at its mercy' K.M Panikkar*

(Rumley, Doyle, & Chaturvedi, 2012)

### 1.1 Penahuuan

Konsep Indo-Pasifik yang membentang dari Laut Hindia hingga Laut Pasifik menyimpan potensi kepentingan yang sangat strategis, sebesar 80-90 persen jalur distribusi perdagangan minyak bagi Amerika Serikat dan negara-negara Asia dan Pasifik melintasi kawasan laut ini (Medcalf R., 2018). Penyebutan Indo-Pasifik itu sendiri bukanlah merupakan suatu konsep yang baru, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada masa kepresidenan Barack Obama, Hillary Clinton, telah menggunakan konsep tersebut dalam menyebutkan kerjasama kelautan antara Amerika Serikat dan India pada tahun 2010 dan dengan Australia (Izuyama, 2019). Perdana Menteri Australia dan dalam Buku Putih Pertahanannya berulang kali menyebutkan konsep Indo-Pasifik untuk menjelaskan kepentingan strategisnya dan merujuk indo-pasifik sebagai sebuah hubungan ekonomi yang dinamis. India melalui Perdana Menteri Manmohan Singh dan Narendra Modi menyebutkan konsep tersebut untuk menggambarkan hubungan antara India terhadap Jepang, ASEAN dan Australia (Medcalf R., 2018).

Dalam pandangan Karl Haushofer yang dikutip oleh Sigmund Neumann yang menyatakan bahwa Kawasan Indo-Pasifik merupakan



kawasan yang kaya akan sumber daya dan bagi siapapun yang mampu menyatukannya dapat menjadi penguasa dunia, “*whoever could make an alliance with that part of the globe [the Indo-Pacific area] with its rich resources and could rule the rest of the world*” (Medcalf R., 2018) (Rumley, Doyle, & Chaturvedi, 2012). Berbagai definisi diberikan terhadap konsep Indo-Pasifik yang semuanya menyebutkan bahwa kawasan ini membentang dari Lautan Pasifik Barat hingga sebelah Barat Lautan Hindia dimana terdapat norma dan kultur, serta akses hubungan perdagangan dan politik.

Selain potensi ekonomi, keamanan menjadi perhatian negara-negara sekitar antara lain kejahatan pembajakan kapal dagang dan terorisme. Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*) dalam laporan tahunan 2018 mencatatkan bahwa setidaknya terdapat 22 kasus kejahatan di laut berupa pembajakan dengan 57 kasus terjadi di Laut Tiongkok Selatan, 36 kasus terjadi di Laut Hindia Barat yang meliputi Laut Arabia, Laut Afrika Timur dan Laut Hindia secara luas, serta 8 kasus terjadi di Selat Malaka (*International Maritime Organization*, 2019). Melihat potensi tersebut seharusnya tidaklah berlebihan bila memandang perlu dialog diplomasi dan kerjasama dalam bidang keamanan dan ekonomi untuk mengembangkan potensi yang lebih besar lagi. Namun dalam hubungan internasional yang melibatkan interaksi antar negara secara bilateral dan multilateral tidak terlepas dari unsur-unsur kepentingan negara-negara tersendiri yang dapat dilihat dari pembuatan dan implementasi kebijakan luar negerinya yang menghasilkan bentuk-bentuk kompetisi, konflik ataupun kerjasama tergantung dari persepsi masing-masing negara atas penerimaan kebijakan luar negeri negara lain. Dalam implementasi kebijakan luar negerinya, negara mempertimbangkan tata letak fisik negara dan pengaruhnya terhadap negara lain yang menurut F.W. Dijkink dipandang sebagai sebuah *geopolitical vision* yaitu “*any idea concerning the relation between one’s own and other places, invoking feelings of (in)security or (dis)advantage and/or invoking ideas about a collective mission or foreign policy strategy*” (Rumley, Doyle, & Chaturvedi, 2012).

Transformasi China menjadi kekuatan super power dunia yang berasal dari asia membawa euphoria di dunia internasional mengenai perlunya perimbangan kekuatan baru di ranah sistem internasional terhadap barat. Kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) diinisiasi oleh Presiden

di samping disambut sebagai suatu terobosan berani dari Tiongkok untuk mengembangkan pengaruhnya dalam bentuk bantuan dan kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi, walaupun tentu saja tidak semua negara di dunia menganggapnya sebagai hal positif dalam hubungan internasional yang hendak dibangun oleh Tiongkok (Bharadwaj). Kebijakan ini juga sekaligus memperkuat klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan juga memperkuat kebijakan Jalur Sutera Tiongkok. Melihat perubahan tersebut, Amerika Serikat yang tampil sebagai sebuah kekuatan tunggal pasca berakhirnya Perang Dingin, meninggalkan Rusia yang sebelumnya merupakan rival dalam politik internasional, merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah baru dalam politik luar negerinya terutama terhadap Asia setelah sebelumnya fokus dengan permasalahan Timur Tengah. Salah satu strategi yang cukup populer di masa Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat adalah "*United State of America Pivot to Asia*" yang digadang sebagai sebuah kebijakan luar negeri dimana Asia dianggap sebagai wilayah yang potensial dalam hubungan ekonomi dan politik Amerika Serikat dimasa depan.

Namun menghadapi perkembangan kepentingan dan kekuatan China yang cukup dinamis di kawasan Asia dan Pasifik melalui interkoneksi perdagangan yang diusung dalam BRI, Amerika Serikat, mencoba untuk memedamkannya' melalui suatu kebijakan yang dikenal sebagai '*Indo-pacific strategy*'. Bharadwaj (N.D) menyatakan bahwa bagi Amerika Serikat strategi yang diperkenalkan pada tahun 2006/2007 merupakan sebuah kebijakan untuk merespon kebangkitan China dan India dalam bidang ekonomi dan militer, serta mereposisi kembali fokus Amerika Serikat terhadap kawasan Asia dan Pasifik. Kawasan yang terbentang dari selat Hormuz hingga selat Malaka mengandung nilai strategis kemaritiman sebagai jalur perdagangan komersial dan jalur lintas ekspor-impor energi tidak hanya bagi Amerika Serikat, namun juga bagi India, Jepang dan China.

Pada tahun 2018 Amerika Serikat mencatatkan setidaknya telah melakukan perdagangan sebesar 1,9 triliun dolar Amerika Serikat terhadap kawasan indo-pasifik, menciptakan 5,1 juta pekerjaan, serta telah berkontribusi sebesar 2 triliun dolar bantuan luar negeri sejak pasca Perang Dunia II yang disampaikan dalam sebuah laporan mengenai "*A Free and Open Indo-Pacific, Advancing Shared Vision*" pada November tahun 2019



lalu (Department of State United State of America, 2019). Bagi Amerika Serikat strategi ini juga dipandang sebagai sebuah persepsi keamanannya terhadap gerak laju China melalui kebijakan *'string of pearls'* yang dianggap membangun sebuah dominasi di lingkungan Laut Hindia dan Laut Cina Selatan melalui investasi pembangunan pelabuhan laut dalam di Gwadar Pakistan, Kyaukpadaung-Myanmar, Chittagong-Bangladesh serta Hambantota Sri Lanka (Bharadwaj). Persepsi tersebut tidaklah salah sepenuhnya dengan memperhatikan bahwa kapal selam milik angkatan bersenjata China telah dua kali melakukan kunjungan ke Sri Lanka pada tahun 2014 lalu, sehingga investasi pembangunan pelabuhan laut dalam di Sri Lanka dianggap sebagai sebuah ambisi China untuk membangun jalur pertahanan lautnya (Medha R., 2018).

Melalui persepsi tersebut Amerika Serikat merasa perlu untuk membangun suatu bentuk kerjasama lintas benua yang terdiri dari negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama di wilayah Indo-Pasifik yaitu antara lain Jepang, Australia dan India melalui pertemuan diastrategis quadrilateral yang dilakukan oleh keempat negara tersebut. Mendapatkan kenyataan tersebut China melihat pertemuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia sebagai sebuah aliansi berbentuk seperti NATO (*NATO in-the-making*) dan bahwa telah terjadi peningkatan kompetisi atas wilayah Indo-Pasifik serta merasakan adanya tekanan terhadap negaranya. Walaupun demikian di dalam tulisannya Hemmings (Hemmings, 2017) menyatakan bahwa Quadrilateral itu sendiri bukan sebuah aliansi melainkan, "... a loose geostrategic alignment of states concerned with China's potential challenge to their interests-...". Quadrilateral menurut Hemmings hanyalah pertemuan secara rutin dilakukan oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India dalam rangka untuk mengantisipasi perluasan pengaruh Tiongkok yang semakin besar, pertemuan itu sendiri di dorong atas dasar kepentingan nasional masing-masing negara sendiri dari sudut pandang ancaman dan tantangan yang dirasakan negara-negara tersebut. Namun demikian keempatnya tetap merasa perlu untuk menstabilkan hubungan dengan China.

Strategi yang diusung oleh Negeri Paman Sam tersebut disambut dengan banyak ragam pendapat antara lain di Asia Tenggara, yang secara geographi terletak di tengah kawasan Indo-Pasifik dalam pertemuan

Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Myanmar (*ASEAN Foreign Ministers Meeting*) diusung oleh Indonesia menginginkan peran yang lebih besar bagi Asia Tenggara dalam ASEAN untuk menentukan bentuk-bentuk kerjasama yang hendak dilakukan dimana konsep Indo-Pasifik diadopsi sebagai sebuah kerangka kerjasama geo-politik dan geo-ekonomi (Mishra, 2015).

Australia memandang konsep Indo-Pasifik sebagai sebuah bentuk kesempatan untuk mengembangkan hubungan diplomasinya dengan negara-negara yang ada di dalam kawasan tersebut. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan vital Australia terhadap koridor laut yang menghubungkan Laut Hindia dengan Laut Atlantik dan Pasifik serta negara-negara yang memiliki hubungan strategis dengan Australia. Selain itu adanya persepsi ketidakjelasan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Australia di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang menyatakan akan mereka ulang hubungan yang sudah lama terjadi sebagai akibat permasalahan penerimaan pencari suaka dari pengungsi yang tiba di Australiamelalui jalur maritim Indo-Pasifik, yang menurut Trump dianggap merugikan Amerika Serikat. Walaupun demikian Perdana Menteri Malcolm Turnbull berhasil meyakinkan Trump melalui kesepakatan tariff impor baja dan alumunium (Izuyama, 2019). Hal lain yang membuat Australia mengembangkan hubungan secara luas dengan negara-negara di kawasan indo-pasifik adalah bahwa Buku Putih Pertahanan Australia secara konsisten sejak tahun 2013 menyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik menjadi fokus perhatian keamanan Australia. Hal ini terkait dengan kekhawatiran Australia terhadap pengaruh Tiongkok yang semakin menguat di Laut Tiongkok Selatan. Australia dibawah perjanjian *Five Power Defence Arrangement (FPDA)* secara bertahap memperkuat basis kerjasama militer dengan beberapa negara asia tengagra antara lain Malaysia dimana terdapat pangkalan udara Butterworth milik Australia, secara regular berpartisipasi dalam latihan militer bersama Balikatan dengan Philipina, serta melakukan patrol secara rutin di Laut China Selatan. Secara umum Australia memandang penting untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, hal ini selaras tujuan yang diusung oleh Amerika Serikat yaitu:

1. Penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara bangsa



2. Penyelesaian permasalahan secara damai
3. Adanya kebebasan, keadilan dan hubungan timbal balik dalam perdagangan atas dasar keterbukaan investasi, transparansi perjanjian dan konektivitas
4. Penghormatan terhadap Hukum Internasional termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi dan penerbangan (Department of State United State of America, 2019)

## 8.2 Pengaruh Strategi Indo-Pasifik terhadap Posisi India di Kawasan

Konsep Indo-Pasifik memberikan makna tersendiri yaitu bahwa India akan menjadi *major power* sebagai negara maritim dan keinginannya untuk secara pro-aktif mendekati diri dengan ASEAN untuk membangun arsitektur regional (Izuyama, 2019). Oleh karenanya India menaruh perhatiannya terhadap kawasan ini. Manmohan Singh, Perdana Menteri India dalam pernyataannya mengenai kebijakan luar negeri India yang dikutip di dalam *Freedom to Use the Seas: India's Maritime Military Strategy* yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan India untuk Angkatan Laut tahun 2007

*"India's growing international stature gives it strategic relevance in the area ranging from the Persian Gulf to the Strait of Malacca.... India has exploited the fluidities of the emerging world order to forge new links through a combination of diplomatic repositioning, economic resurgence and military firmness."*

*(Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), 2007)*

Dalam pernyataan tersebut disebutkan kepentingan geopolitik, keamanan dan ekonomi India atas wilayah perairan mulai dari Teluk Persia hingga Selat Malaka, serta bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Penyebutan Teluk Persia hingga Selat Malaka menunjukkan bahwa Strategi Indo-Pasifik yang ditawarkan oleh Amerika Serikat sesuai dengan kepentingan India. Penyebutan Indo-Pasifik dalam kebijakan Pertahanan India juga disampaikan di dalam Buku Strategi Kelautan India berjudul *Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy* yang diterbitkan pada tahun 2015, dalam pengantarnya Kepala Staf Angkatan Laut India Admiral RK Dhowan (Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), 2015)

menyatakan adanya perubahan geo-strategi pada ranah global dan regional dari Euro-Atlantik kepada Indo-Pasifik, terlebih adanya perubahan sikap oleh negara-negara besar dalam terhadap Asia sebagai fokus pengembangan hubungan kerjasama dan terjadinya kompetisi ekonomi dan militer yang mempengaruhi kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial di kawasan Samudera Hindia. Mengetahui perkembangan ini India perlu untuk menyesuaikan diri dengan menempatkan kepentingan ekonomi dan militernya serta meningkatkan hubungan diplomatik dan politik atas kawasan indo-pasifik, mengingat 90% volume dan 70% nilai perdagangan India melalui wilayah ini.

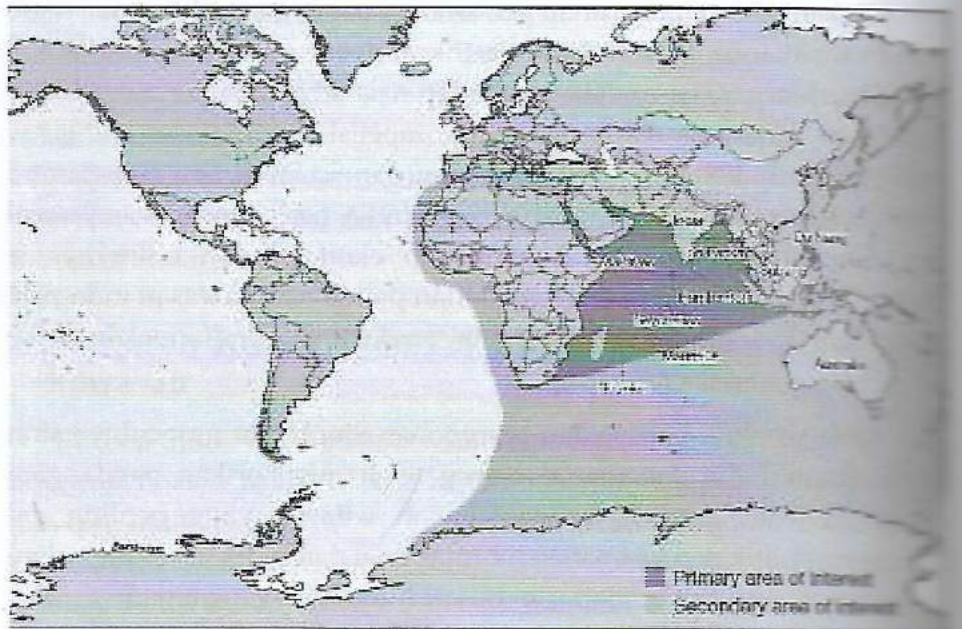
Jauh sebelum pernyataan Manmohan Singh dan munculnya strategi kemaritiman India, Jawaharlal Nehru telah memberikan pandangannya mengenai teater pasifik sebagai sebuah wilayah yang penting dalam panggung politik dan keamanan internasional dan India harus menjalankan perannya sebagai bagian dari dinamisasi hubungan yang terjadi

*The Pacific is likely to take the place of the Atlantic in the future as a nerve centre of the world. Though not directly a Pacific state, India will inevitably exercise an important influence there. India will also develop as the centre of economic and political activity in the Indian Ocean area, in South-East Asia and right up to the Middle East. Her position gives an economic and strategic importance in a part of the world, which is going to develop rapidly in the future*

(Mishra, 2015)

India sebagai negara yang secara geographi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang merupakan bagian dari strategi Indo-Pasifik tidak bisa begitu saja membiarkan pengembangan strategi tersebut secara bebas, mengingat bahwa rentang wilayah strategi ini meliputi Laut Hindia hingga Laut Pasifik. namun demikian India membagi 2 wilayah kepentingannya atas kawasan indo-pasifik yaitu yang merupakan wilayah inti yang merupakan zona fokus kepentingan utama antara lain membentang dari timur selat Malaka hingga selat Lombok, dan wilayah yang merupakan zona pendamping yaitu wilayah Laut China Selatan, Laut China Timur, hingga pesisir barat laut Pasifik (Izuyama, 2019).





Sumber: (Izuyama, 2019)

### Gambar 8.1 Wilayah Kepentingan India atas Indo-Pasifik

Sebagai negara besar dan aktor utama di wilayah Asia Selatan India harus melibatkan dirinya dalam perkembangan politik internasional yang terjadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Nehru di penghujung Perang Dunia II. Kebijakan 'Melihat Ke Timur' (*Look Act Policy*) India harus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan China dan Amerika Serikat. Pembangunan pelabuhan laut dalam di Sri Lanka sebagai bentuk implementasi kebijakan *Belt Road Initiative* China mengundang alarm pertahanan India, ditambah dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pakistan dan China dalam pengembangan sistem pertahanan Pakistan. Seperti yang disampaikan oleh Izuyama dan Ishihara (Izuyama, 2019) bahwa sejak tahun 2000 India telah meningkatkan pengaruhnya terhadap wilayah samudera Hindia dengan menyediakan bantuan peningkatan kapasitas (*capacity building assistance*) terhadap negara-negara di wilayah tersebut termasuk di dalamnya ASEAN. Peningkatan pengaruh tersebut dinilai perlu dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi dengan pemerintah terhadap nilai-nilai kebudayaan bersama.

Strategi Indo-Pasifik merupakan suatu kesempatan bagi India untuk menunjukkan eksistensinya di kawasan. Namun demikian dalam strategi ini, India tampil dengan caranya sendiri, perubahan kebijakan luar negeri India untuk melibatkan diri dalam strategi Indo-Pasifik bukanlah semata untuk menyenangkan mitra-mitra dialognya dalam pertemuan Quadrilateral namun untuk menunjukkan bahwa India hadir dengan membawa keseimbangan di kawasan dan secara hati-hati untuk tidak memprovokasi siapapun termasuk China. Walaupun demikian dalam beberapa kesempatan, kebijakan luar negeri India menunjukkan sikap yang cukup menantang terhadap politik luar negeri yang dijalankan oleh China di kawasan Asia Selatan. Dalam strategi yang dikemukakan oleh AS, India dianggap mampu menyediakan jaring pengaman di wilayah Indo-Pasifik, dan untuk menegaskan kerjasama pengembangan sistem pertahanan India melalui skema investasi dilakukan dengan cara transfer perlengkapan dan teknologi.

### 3.2.1 Dari "Look East Policy" kepada "Act East Policy"

Dunia Internasional adalah sebuah lingkungan yang dinamis dengan perubahan-perubahan sebagai akibat hubungan antar aktor-aktor di dalamnya baik negara ataupun bukan yang berlandaskan kepada asas kepentingan. Asas tersebut muncul seiring dengan perubahan itu sendiri antara lain rezim kepemimpinan, tuntutan rakyat, kondisi perekonomian, iklim politik domestik yang memberikan pengaruh terhadap tatanan sistem internasional. Sebagai negara dengan jumlah populasi lebih dari 1,2 milyar penduduk, Bank Dunia mencatat India sebagai negara yang berada pada posisi ke tiga dunia dalam hal paritas pembelian (*purchasing parity*) dan berhasil mengangkat kurang lebih 90 juta penduduknya keluar dari perangkap kemiskinan pada periode waktu 2011 hingga 2015, sehingga India dinominasikan menjadi negara dengan pendapatan menengah atas pada tahun 2030 (The World Bank, 2019). Keberhasilan India tersebut tidak terlepas dari peran pengambilan kebijakan India dalam melihat kebutuhan domestik dan peluang pada hubungan internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Legro bahwa tatanan internasional dibentuk dan dihilangkan oleh ide-ide dan perubahan ide itu sendiri sementara para ilmuwan dan pembuat kebijakan hanya memiliki sedikit saja alat bantu untuk mengantisipasinya.



Masih menurut Legro bahwa untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri tersebut tertuju pada ide-ide kolektif, situasi strategis dan politik domestik, terhadap argumentasi yang terus berkembang dan berubah atas harapan, keadaan dan sikap (Chacko, 2014).

Salah satu kebijakan luar negeri India yang cukup populer sehingga mampu membawa peran strategis India di kancah hubungan internasional khususnya di wilayah Asia adalah *Look East policy*. Perlunya Perubahan kebijakan luar negeri tersebut lahir dari gagasan Nehru mengenai perlunya pendekatan baru India terhadap situasi politik dunia terutama perubahan dalam lanskap geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis. Implementasi perubahan tersebut dilaksanakan pada kepemimpinannya Narasimha Rao sebagai Perdana Menteri India pada tahun 1992 dengan nama *Look East Policy* yang merupakan bentuk penempatan kembali posisi India sebagai negara pemengaruh dan sekaligus mitra strategis terutama bagi negara-negara Asia Tenggara, Korea, Jepang dan China. Melalui kebijakan tersebut India mampu keluar dari krisis keseimbangan pembayaran dengan masuknya investasi asing langsung sehingga roda perekonomian India menggeliat kembali (Jaishankar D., 2019). Namun perkembangan internasional tidak menutup mata bahwa China secara perlahan dan pasti mampu menandingi kemampuan ekonomi dan militer Amerika Serikat dengan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika. Melalui kebijakan luar negerinya *Belt Road Initiative*, China meningkatkan kerjasama bilateral dan regional kepada tingkatan strategis, suatu hal yang mengundang kekhawatiran India, terutama di kawasan Asia Selatan dimana kerjasama antara China dan Pakistan meningkat. Pergerakan angkatan laut China semakin aktif menjangkau Afrika setelah diresmikannya pangkalan militer luar negeri pertama China di Djibouti. Memperhatikan fakta-fakta tersebut secara perlahan terjadi pergeseran kebijakan India kepada suatu tindakan, *Act East Policy*.

Kebijakan tersebut dijabarkan oleh Jaishankar meliputi empat elemen tindakan yaitu

1. Mengamankan kawasan Samudera Hindia dari perluasan kompetisi melalui peningkatan kewaspadaan maritim, peningkatan kehadiran dan kemampuan angkatan laut, meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur, serta kemampuan kepemimpinan institusional



2. Akselerasi integrasi hubungan diplomatik, ekonomi dan militer India dengan Asia Tenggara dalam rangka menghadirkan penyeimbangan kekuatan di kawasan
3. Meningkatkan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, Perancis, Rusia dan negara-negara lain yang memiliki kepedulian atas peningkatan kemampuan Tiongkok
4. India harus mampu juga menjaga hubungan dengan Tiongkok sebagai bentuk tindakan mitigasi atau mengurangi tingkat ketegangan sebagai akibat adanya perbedaan sikap dan pandangan sekaligus mencari alternatif bentuk hubungan yang tersedia (Jaishankar D., 2019)

Sementara menurut Singh tujuan utama dari "Act East Policy" bagi India adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, pengembangan teknologi, ikatan kebudayaan, dan hubungan strategis antara India dan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur (Sheliya & Joshi, 2019). Melalui kebijakan ini India mengakui pentingnya kawasan Asia Tenggara dalam menciptakan jaring pengaman di peninsula India dan bagi perniagaan dan perdagangan.

Dalam perspektif keamanan maritim India terdapat sembilan akses jalur laut terhadap samudera Hindia (*nine choke points*) yang penting dan menjadi perhatian dalam kebijakan maritim India yaitu lima di Afrika dan Tengah antara lain (1) Selat Hormuz yang menghubungkan laut Arab kepada teluk Oman dan teluk Persia; (2) Terusan Suez dan Laut Merah sebagai gerbang antara Eropa dan Asia; (3) Selat Bab-el-Mandeb; (4) *Cape of Good Hope*; (5) *Mozambique Channel*, empat alur akses lainnya terdapat di Asia Tenggara yaitu (1) Selat Malaka sebagai jalur yang sangat penting dalam menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik; (2) Selat Lombok; (3) Selat Sunda; (4) Selat Ombai dan Wetar yang terletak di kepulauan Alor dan Timor (Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), 2007) (Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), 2015). Sejak masa dahulu tidak ada keinginan India untuk menguasai lautan sehingga dalam pengembangan kekuatan lautnya tidak begitu memadai. Ternyata hal ini menjadi kelemahan dalam pengembangan pertahanan India khususnya di wilayah maritim serta dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu, dari tujuh wilayah tetangganya India memiliki dua permasalahan perbatasan, kemudian permasalahan terorisme dan insurgensi serta tindak kejahatan lainnya yang memanfaatkan kelemahan tersebut. menurut data Penjaga Pantai India



tindak pelanggaran hukum dan kejahatan yang terjadi meliputi beberapa hal yaitu:

**Tabel 8.1** Ancaman Keamanan di Wilayah India

IUU Fishing	Perampokan bersenjata	Survei maritim ilegal
Penyelundupan	Pembajakan	Kejahatan laut pada kapal dagang
Kejahatan di laut melibatkan kapal dan pasukan asing	Penyelundupan Manusia	Penipuan di laut
Penyelundupan obat-obatan terlarang	Penculikan	Spionase dan dukungan insurgensi
Polusi minyak	Imigrasi Ilegal	
Perusakan terhadap kehidupan laut	Teror dan penyelundupan logistik pendukungnya	

Sumber : (Paleri, 2012)

Fakta-fakta tersebut menyebabkan India memiliki alasan kuat untuk memberikan perhatiannya terhadap ke Sembilan akses tersebut, sebagai jalur penting dalam perdagangan internasional dengan lebih dari 90.000 kapal dagang melintasinya dan 40%-nya membawa suplai energi dunia. Sementara bagi India sendiri 80% impor minyak mentah dan 45% gas alam cair diimpor melalui Samudera Hindia, hal ini belum meliputi kepentingan lain India terhadap samudera hindia seperti penangkapan ikan serta pertambangan ekstraksi lepas pantai (Jaishankar D., 2019). Bentuk perhatian India terhadap wilayah maritime tersebut juga terhadap ancaman non-tradisional yang muncul antara lain terorisme, pembajakan, penculikan serta penyelundupan hingga bencana alam, ditambah dengan lemahnya negara-negara pantai yang ada di wilayah samudera hindia dalam menjaga wilayah lautnya. Menurut laporan International Maritime Organization (International Maritime Organization, 2019) terjadi peningkatan atas kejahatan di laut secara umum yang melibatkan pembajakan serta perampokan bersenjata dari yang sebelumnya 204 kejadian ditahun 2017 menjadi 223 kejadian pada tahun 2018 di mana 36 kasus terjadi di Samudera Hindia Barat yang meliputi Laut Arab, Afrika Timur dan sebagian Samudera Hindia, namun secara umum kasus pembajakan pasca 2015 menurun dengan jumlah kasus terendah 162 pada tahun 2019 lalu (Wagner, 2020). Peristiwa pembajakan terhadap terjadi atas kapal-kapal dagang yang melintas di kawasan tersebut



mengundang perhatian internasional dengan membentuk gugus tugas internasional penanganan pembajakan antara lain *Combined Task Force (CTF)* yang merupakan kerjasama 30 negara, Operasi Perlindungan Laut NATO (*NATO Operation Ocean Shield*), serta operasi kelautan yang berbasiskan negara-negara secara mandiri yang dilakukan oleh Tiongkok, India, Jepang, Korea, Rusia dan Iran (Vespe, Greidanus, & Alvarez, 2015).

Jaishankar (Jaishankar D., 2019) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kedekatan India terhadap ASEAN terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu 1) Kehadiran secara politik melalui tindakan-tindakan diplomatik; 2) dalam bidang keamanan kehadiran India haruslah secara sederhana (*modest*) dan 3) konektivitas India melalui tingkat perdagangan. Kedekatan India terhadap kawasan Asia Tenggara secara politik dan keamanan sudah tercipta pasca Perang Dunia II dan pada masa Perang Dingin, dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia, serta kedekatan India dan Viet Nam pada krisis Kamboja. Melihat potensi politik dan kemampuan gelar keamanan India di kawasan, India menjadi mitra dialog ASEAN secara penuh pada tahun 1995 dan setahun kemudian menjadi anggota pada ASEAN Regional Forum (ARF), dimana posisi India sejajar dengan China dan Amerika Serikat serta dapat menjadi penyeimbang diantara keduanya dalam pertemuan dan dialog yang diadakan oleh forum tersebut (Naidu, 2004). Kehadiran India sebagai penyeimbang tidak hanya pada forum-forum ARF saja, bagi ASEAN, kehadiran militer India yang memainkan perannya di Samudera Hindia memberikan nuansa keseimbangan dalam persaingan pertumbuhan kekuatan di Asia terutama terhadap China. Secara bilateral India memiliki kerjasama pertahanan meliputi bidang pelatihan militer, uji coba senjata, pelaksanaan patroli bersama terhadap beberapa negara asia tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Laos, Singapura, Viet nam, Myanmar dan Thailand. Secara umum kerjasama pertahanan India dengan negara-negara Asia Tenggara meliputi latihan angkatan laut bersama, kunjungan pelabuhan. Secara spesifik kerjasama pertahanan kelautan dan ekonomi India adalah terhadap Vietnam, Perdana Menteri India Narendra Modi menyebutkannya pada tahun 2018 lalu dalam memperingati hubungan diplomatik kedua negara yang ke-48 sebagai bentuk hubungan *Comprehensive Strategic Partnership*. Vietnam bahkan mengizinkan Angkatan Laut India untuk dapat mengakses Pelabuhan Nha Trang Selatan yang terletak di teluk Cam Ranh yang dekat dengan Selat



Malaka serta mengizinkan kapal ONGC Videsh untuk melakukan eksplorasi kemaritiman untuk pertambangan minyak lepas pantai di Blok 128 dan 6.1 Laut China Selatan (Sheliya & Joshi, 2019). Akses yang didapatkan tersebut memudahkan India untuk turut dapat mengawasi jalur perdagangan laut terpadat di dunia dan sekaligus mencegah adanya klaim sepihak China sebagai satu-satunya pengontrol Laut China Selatan. Untuk pengembangan pertahanan kelautannya, Hanoi mendapatkan penambahan utang sebesar USD 500 juta dari India, dan sebaliknya Vietnam membeli 10 kapal patroli dan memulai proyek pengembangan kapal serbu Fregats Kelas Petya dan membeli rudal darat ke udara India (Rumley, Doyle, & Chaturvedi, 2012). Selain itu juga dalam kesepakatan kerjasama pertahanan yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2007, India akan memberikan pelatihan terhadap kru kapal selam dan pilot pesawat tempur Vietnam. Sementara dari sisi perekonomian perdagangan kedua negara meningkat pesat di tahun 2017 sebesar 43 persendari tahun sebelumnya dan menargetkan bahwa tingkat perdagangan kedua negara akan mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 pada bidang tekstil, perminyakan, kosmetik, kimia, plastik dan kulit.

Selain Vietnam, Indonesia menjadi target utama dalam pengembangan hubungan dalam kebijakan 'Bertindak Ke Timur' tersebut. Brewster mengungkapkan bahwa geostrategi dan geo-politik Indonesia memberikan asas manfaat bagi India dalam menerapkan kebijakan AEP (*Act East Policy*) yaitu

1. Sebagai negara besar dan sekaligus sebagai pendiri ASEAN Indonesia dapat menjembatani kepentingan India terhadap negara-negara asia tenggara lainnya khususnya di dalam ASEAN.
2. India dapat memanfaatkan dinamisasi hubungan dan konflik Indonesia dan China dalam membatasi pengaruh China secara luas di kawasan Indo-Pasifik.
3. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat searah dengan kepentingan India terhadap negara adi kuasa tersebut.
4. Indonesia memiliki tiga *Sea Lane of Communication* (SLOC) yaitu Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Sunda yang masuk dalam kepentingan maritim India sekaligus posisi Indonesia berada di silang benua yang terhubung langsung dengan Samudera Hindia (Sheliya & Joshi, 2019).

Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo yang menekankan kepada pengembangan secara maksimal sumber daya kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia antara lain dengan meningkatkan diplomasi masitim, peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kemaritiman antara lain dengan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan, serta peningkatan pendapatan dari sektor kemaritiman antara lain peningkatan hasil tangkap ikan yang diiringi kebijakan perlindungan wilayah laut tangkap ikan Indonesia. Sheliya dan Joshi (2019) menyatakan bahwa India menyambut baik kebijakan yang disampaikan oleh Joko Widodo di awal inaugurasinya sebagai Presiden, melalui bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh India, dengan harapan bahwa melalui itikad baik tersebut India dapat mencapai tujuan strategisnya di Indonesia antara lain yaitu melindungi SLOC dan memonitor pergerakan di Teluk Bengal dan selat malaka serta mengumpulkan data dan memonitor pergerakan China di kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu India mengharapakan untuk dapat membantu Indonesia mengembangkan pelabuhan di sekitar selat Lombok yang dapat dijadikan rute alternatif ke Asia Tenggara selain selat malaka, India juga berharap agar Indonesia mengizinkan Angkatan Lautnya untuk dapat mengisi logistik dan bahan bakar melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Dinamisme hubungan internasional yang terjadi di Asia Tenggara dalam bidang kerjasama politik dan keamanan, perkembangan ekonomi serta multikulturalisme yang berkembang telah menarik perhatian India untuk lebih banyak berinteraksi terhadap kawasan ini. Hubungan India terhadap kawasan ini dapat ditelusuri dari peninggalan kebudayaan yang membentuk masyarakat asia tenggara kecuali terhadap Philipina (Hill, 2002). Cerita mengenai *Ramayana* dan *Mahabrata* yang sering diceritakan melalui pertunjukkan wayang di Indonesia, serta ornamen yang ada di Candi-Candi peninggalan kerajaan Hindu pada masa lalu di Angkor dan Phimai Kamboja, Sukothai dan Sawankhalok di Thailand, Cham di Viet Nam, serta Borobudur dan Prambanan di Indonesia. Selain itu pengaruh India juga dapat dilihat dari Bahasa tulis sansekerta yang digunakan di Thailand, Kamboja dan Myanmar hingga penyebaran agama Islam kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat India. Romantisme tersebut yang dibalut dengan kepentingan India terhadap



kawasan dikemas dalam bentuk pendekatan lunak (*soft power*). Joseph Nye menyatakan bahwa *soft power* merupakan suatu pendekatan melalui nilai ketertarikan dan kesetaraan yang membuat negara atau aktor internasional berpengaruh terhadap sistem internasional dalam bentuk hubungan bilateral ataupun terhadap institusi internasional (Dellios & Ferguson, 2011). Dalam praktiknya pelaksanaan pendekatan lunak ini diejawantahkan pada kebijakan "*Look East Policy*" dalam bentuk hubungan ekonomi dibidang perdagangan, investasi dan hubungan antar masyarakat (*people-to-people contact*) (Palit, 2015).

Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, hubungan India-ASEAN semakin erat dan mengalami peningkatan melalui kemitraan strategis dalam perubahan kebijakan '*act east*' India yang disampaikan pada Pertemuan ASEAN-India ke-12 dan Pertemuan Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar tahun 2014 lalu. Kebijakan untuk mendekatkan India kepada ASEAN ditempuh melalui skema perdagangan dan perjanjian investasi, bahkan India merupakan mitra dagang ASEAN pada urutan ke empat besar dengan nilai total jumlah perdagangan mencapai 81.33 milyar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2018 setelah ditandatangani kesepakatan Perdagangan bebas India-ASEAN (India-ASEAN Free Trade Area/ IAFTA) pada kesepakatan mengenai Perdagangan dibidang Jasa dan Investasi, nilai investasi negara-negara anggota ASEAN mencapai 69 milyar dolar, sementara investasi India terhadap ASEAN mencapai 38 milyar dolar (mea.govt.in, 2018). Untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN yang lebih luas lagi India masuk dalam kerangka pembentukan kemitraan ekonomi kawasan (*Regional Comprehensive Economic Partnership/ RCEP*) bersama dengan China, Australia, Selandia Baru serta Korea Selatan. Hubungan India dengan negara-negara anggota ASEAN tidak terbatas hanya pada bidang ekonomi dan investasi, sebagai negara yang memiliki kedekatan dalam hal budaya, upaya peningkatan hubungan antar manusia (*people to people contact*) menjadi salah satu perhatian. Oleh karenanya banyak program yang telah disepakati, antara lain dalam bidang pemerintahan melalui *Training Programme for ASEAN Diplomat*, hubungan ekstra parlementer melalui *Exchange of Parliamentarians*, di bidang pendidikan *ASEAN-India Students Exchange Programme*, hingga media *ASEAN-India Media Exchange*.

### 8.3 Hubungan India dan Amerika Serikat dalam Strategi Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi kompetisi perebutan pengaruh dari negara-negara *great power* dikarenakan potensi ekonomi dan strategisnya. Walaupun India bukan termasuk kedalam kategori *great power* namun keterlibatannya di dalam dialog quadtrilateral dapat di artikan bahwa India memiliki peranan yang strategis dalam strategi Indo-Pasifik yang digadang oleh Amerika Serikat. Namun walaupun terlibat di dalam *quad* tersebut, India sepertinya tidak tertarik untuk membentuk aliansi keamanan yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di wilayah Indo-Pasifik dan lebih mengedepankan hubungan kerjasama multilateral yang lebih lunak serta menguntungkan bagi India.

Dalam konsep tersebut Samudera Hindia yang merupakan wilayah kemaritiman dari India masuk dalam nilai strategis Indo-Pasifik. Bagi India samudera hindia tidak hanya menyimpan potensi ekonomi dan strategis saja, namun juga menyimpan potensi ancaman terhadap keamanan dalam negerinya. Oleh karenanya India mendeklarasikan dirinya sebagai *net security provider* (penyelenggara jaring keamanan) bagi samudera Hindia (Todi, 2019). Untuk mewujudkannya dalam buku yang diterbitkan oleh Angkatan Laut India, *Freedom to use the seas: India's Maritime Military Strategy*, bahwa perlunya memperkuat militer dalam bidang kemaritiman, dalam hal ini Angkatan Laut India memiliki peranan penting dan sentral sebagai katalis untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Kawasan Samudera Hindia (Indian Ocean Region / IOR) (*Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)*, 2015).

Untuk mengembangkan potensi pertahanan maritim dan pengaruhnya, India memilih untuk bekerjasama dengan banyak negara terutama yang berada di kawasan Indo-Pasifik antara lain negara-negara *Quad* (Jepang, Amerika Serikat dan Australia), ASEAN, dan negara pada kawasan barat Samudera Hindia. Salah satu negara yang menjadi perhitungan India untuk menangkal pengaruh China yang meluas adalah Amerika Serikat. Hubungan antar kedua negara secara harmoni mulai terjalin pasca Perang Dingin berakhir dengan diangkatnya sanksi atas India oleh pemerintahan



George W Bush pada tahun 1999, dimana Amerika Serikat mendukung posisi India saat konflik terhadap Pakistan mengenai wilayah Kargil. Dalam suatu *briefing* oleh pejabat tingkat tinggi di Washington D.C tahun 2005 mengenai hubungan Amerika Serikat dan Asia Selatan (U.S Department of State, 2005) (Jaishankar D., 2019), Amerika menganggap bahwa India merupakan sebuah negara besar yang siap untuk bertansformasi menjadi salah satu kekuatan dunia di abad ke-21 dan untuk membantu India mewujudkannya, Amerika Serikat siap untuk menjadi mitra strategis India dalam mengembangkan segala potensinya termasuk dibidang militer.

Serangan teroris yang terjadi di Mumbai pada November 26 tahun 2008, semakin menguatkan kerjasama antara India dan Amerika Serikat dalam membangun sistem pertahanan India. Lowy Institut menyebutkan bahwa keinginan India untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat mendapatkan dukungan 75% masyarakat India, bahkan pada masa administrasi Presiden Barack Obama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang mendorong agar India tidak hanya melihat ke timur namun juga melakukan suatu "*engagement east and act east*" yang pada akhirnya ditahun 2014 menjadi suatu kebijakan India yang disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi di Myanmar (Rajendram, *India's New Asia-Pacific Strategy: Modi Act East*, 2014). Hal ini diperkuat dengan pertemuan 2+2 antara India dan Amerika Serikat pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan pertahanan serta, pada tahun desember 2019 lalu antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R. Pompeo dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T. Esper menerima Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar. Dalam pertemuan 2+2 yang kedua tersebut Amerika Serikat menegaskan dukungan terhadap kerja bersama mendukung kawasan Indo-Pasifik yang Bebas, Terbuka dan Inklusif. Bersama dengan India, Amerika Serikat akan bekerjasama untuk mengurangi ancaman regional dan global, memerangi terorisme, koordinasi dalam penanganan kebencanaan, pelatihan paskan perdamaian dan promosi infrastruktur yang transparan dan berkelanjutan, serta peningkatan keamanan maritime (U.S Department of State, 2019).



Figure 1: Foreign Military Sales Agreements. 2003 – 2017

Sumber: Rej, A., (2020), "Dalliance No More: How India-US Defence Trade Relationship Matures Over Years", dari <https://www.news18.com/news/opinion/dalliance-no-more-how-india-us-defence-trade-relationship-matures-over-years-2510343.html>, diakses pada 20 Maret 2020, pukul 20.00wib

**Grafik 8.1** Penjualan Senjata Amerika Serikat kepada India

Dalam bidang militer India dan Amerika Serikat menjalin kerjasama dalam bentuk latihan bersama antara lain *tri-service-military exercise* antara lain latihan *tri-service Tiger Triumph* November tahun 2019 lalu, Latihan Malabar yang melibatkan Jepang pada September-Oktober 2019, adanya kesepakatan bersama dalam bidang pertahanan antara lain *Logistic Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)* dan *Cooperations Compatibility and Security Agreement (COMCASA)* (Jaishankar D., 2019) (Indian Navy, 2019). Sejak tahun 2018 India telah mengeluarkan US\$16 milyar untuk membeli alat-alat pertahanan dari Amerika Serikat, bahkan dalam laporan majalah Forbes tahun 2020 ini India telah sepakat untuk membeli beberapa persenjataan dari Amerika Serikat sebesar US\$3,5 milyar untuk memperkuat Angkatan Lautnya (Roblin, 2020).

**8.4 Perspektif India Atas China dalam Indo-Pasifik**

Kebijakan luar negeri China mengenai *Belt Road Initiative* mengundang reaksi yang beragam mulai dari pendukung dan yang menentang, dalam



pertemuan yang dilakukan pada tahun 2017 lalu mengenai rencana China tentang "Jalur Sutera Maritim" (*Maritime Silk Road*) yang membentang hingga wilayah Asia Selatan, menghubungkan beberapa pelabuhan dari beberapa negara di kawasan yang menjadi bagian dari konsep Indo-Pasifik. Melalui teori *string of pearl* (Sheliya & Joshi, 2019) (Dabas, 2017) menyatakan bahwa China tengah mengembangkan kehadiran militer dan kepentingan komersial yang besar melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang membentang dari daratan China hingga Pelabuhan di Sudan, dan selanjutnya menepikan posisi India dari sentralitas kuasa di Asia Selatan dan Kawasan Samudera Hindia.

Dalam perkembangan tersebut China telah mendapatkan akses dari Pemerintah Myanmar untuk mengembangkan pelabuhan laut dalam Kyauk Pyu yang terletak di Teluk Bengal melalui pembagian 70 persen saham dari *China International Trust Investment Corporation (CITIC)*, dan selanjutnya membangun jalur pipa minyak yang menghubungkan Kyauk Pyu dan Kunming di China. Posisi tersebut tentu saja menguntungkan bagi China terutama disaat krisis yang disebut dengan *Malacca Dilemma* bila berhadapan dengan India yang pernah terjadi pada tahun 1997 pada saat konflik India-Pakistan, dimana kapal Angkatan Laut India melakukan penghadangan terhadap kapal dagang China yang berlayar dari Samudera Hindia (Scott, 2017).

Dalam visi China mengenai kerjasama maritim di bawah kerjasama *Belt Road Initiative (Vision for Maritime Cooperation under the Belt Road Initiative)* untuk melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara yang masuk di dalam kebijakan jalur sutera dengan menghubungkan titik demi titik pelabuhan di samudera Hindia. Sri Lanka pada tahun yang sama dengan kerjasama Myanmar dan China, pun setuju untuk mendapatkan bagian saham dari pengembangan pelabuhan laut dalamnya di Hambantota yang dikelola oleh *the China Merchant Port Holdings (CMPH)* dengan masa kelola 99 tahun, Scott menambahkan bahwa baik CITIC maupun CMPH merupakan Badan Usaha Milik Negara China yang berarti kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut menggambarkan representasi dari strategi pemerintah China.

Kekhawatiran India mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap negara-negara di kawasan Samudera Hindia

semakin menjadi setelah munculnya kerjasama antara China dan Pakistan dalam *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) dan dimulai proses pengembangan pelabuhan Gwadar, Pakistan untuk masa 40 tahun melalui *the China Overseas Port Holding Company* (COPHC). Selain Sri Lanka dan Pakista, Bangladesh pun menjadi tumpuan China yaitu dengan membantu pemerintah Bangladesh membangun pelabuhan Chittagong yang dalam beberapa kesempatan dikunjungi oleh Kapal Selam Angkatan Laut China. Dengan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan tersebut, China mulai mengerahkan kapal-kapal perangnya untuk melakukan operasinya di Samudera Hindia dan Pelabuhan Gwadar merupakan salah satu pelabuhan yang secara aktif digunakan oleh Angkatan Laut China.

Hubungan antara India dan China secara bilateral tidak dapat disebutkan sebagai hubungan yang biasa. Dinamisasi hubungan keduanya menyangkut pada konflik wilayah perbatasan di dataran tinggi Doklam (India) atau Donglang (China), pengembangan strategi maritim China melalui kebijakan Jalur Sutera, serta kerjasama antara China -Pakistan yang mengundang kecurigaan India bahwa tujuannya adalah supremasi China atas India di Asia Selatan dan Samudera Hindia. Menghadapi situasi tersebut dalam pengembangan strategi kemaritiman India menyatakan kepentingan nasionalnya yaitu

1. *"Protect India's Sovereignty and territorial integrity against threats in the maritime environment.*
2. *Promote safety and security of Indian Citizens, shipping, fishing, trade, energy supply, assets and resources in the maritime domain.*
3. *Pursue peace, stability and security in the maritime zones, neighborhood, and other areas of maritime interest.*
4. *Preserve and project other national interests in the maritime dimension."*  
(Sheliya & Joshi, 2019)

Dalam praktiknya India melakukan modernisasi terhadap pertahanan lautnya dengan membeli persenjataan dari Amerika Serikat ataupun Rusia. Selain melalui pembelian untuk memodernisasi Angkatan Lautnya, India juga berambisi untuk meningkatkan jumlah kapal perangnya dari 138 kapal menjadi 212 kapal perang yang terdiri dari beberapa unsur.



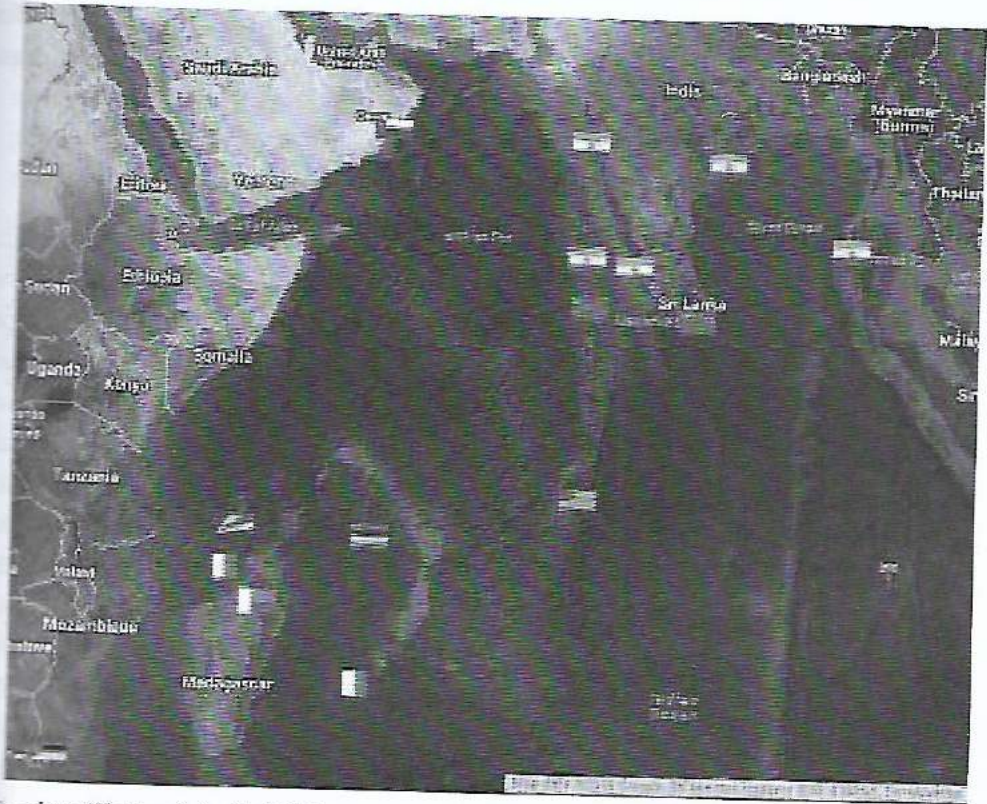
Tabel 8.2 Perbandingan Kekuatan Angkatan Bersenjata India dan China

	India	Tiongkok
Active Military Personnel	1,444,000	2,183,000
Helicopters	722	911
Total Aircraft	2,123	3,210
Fleet Strength	285	777
Aircraft Carriers	1	2
Submarines	16	74
Destroyers	10	36
Frigates	12	52
Corvettes	19	50
Coastal Patrol	139	220
Mine Warfare	3	29
Combat Tanks	4,292	3,500
Armored Vehicles	8,686	33,000
Self Propelled Artillery	235	3,800
Defence Budget US\$ (Nelly, 2019)	51,000,000,000	161,700,000,000,000

Sumber: (Global Fire Power, 2020)

Bila melihat perbandingan kapabilitas yang dimiliki oleh India dan China, keinginan India untuk menambah jumlah Kapal perangnya serta pembelian persenjataan dari Amerika Serikat adalah hal yang wajar. Terlebih jika melihat sebaran basis angkatan laut China di Samudera Hindia yang bersifat mengepung dan mengintimidasi kekuatan India.

Selain mengembangkan kekuatan maritimnya, India juga melakukan pendekatan secara diplomatik dan ekonomi serta dengan negara-negara yang memiliki kerjasama dengan China antara lain pemberian bantuan dan utang luar negeri kepada Myanmar, dengan Bangladesh tercapai kerjasama untuk pembangunan infrastruktur militer di pelabuhan laut dalam Sonadia, serta keaktifan India dalam rangka kebencanaan yang terjadi di negara-negara sekitar. Untuk menghadapi ancaman dari China yang berasal dari Gwadar, India melakukan kerjasama dengan Iran yang memiliki posisi lebih strategis di Selat Hormuz yang memiliki akses lebih dekat dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Kuwait serta Oman dan Qatar dalam distribusi minyak mentah kepada kapal-kapal dagangan asal India.



Sumber: (Sheliya & Joshi, 2019)

**Gambar 8.2** Peta Sebaran Angkatan Laut China

Walaupun terdapat kompetisi dalam mencapai keseimbangan kekuatan antara India dan Tiongkok, namun kerjasama diantara keduanya tetap terjalin dalam bidang perdagangan. Pasca pertemuan Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Xi Jin Ping di Wuhan tahun 2018, investasi China meningkat dengan hadirnya 800 perusahaan asal Tiongkok di India serta 75 pabrik manufaktur diberbagai bidang (Pranav, 2019). Walaupun demikian dalam perdagangan yang terjadi pada periode 2018-2019 antara kedua negara US\$ 53,6 Milyar saja, jumlah ini turun dari periode sebelumnya 2017-2018 yaitu sebesar US\$ 63,1 Milyar. Defisit perdagangan yang terjadi sebagai akibat masih adanya hambatan dalam keterbukaan pasar yang diharapkan oleh India yaitu dibidang Pharmaceutical dan TI (Teknologi Informasi), serta peningkatan investasi China di India dalam bidang infrastruktur dan elektronik untuk mengurangi impor dan meningkatkan lapangan pekerjaan serta peningkatan produksi manufaktur lokal (The Times of India, 2019).



Adanya bentuk ketergantungan antara India dan China, membuat India harus berhati-hati dalam mengambil tindakan untuk tidak memprovokasi China secara terbuka di kawasan Indo-Pasifik.

## 8.6 Kesimpulan

Dalam studi Hubungan Internasional mengenal suatu konsep yaitu anarkisme di dalam hubungan internasional. bentuk hubungan yang anarki tersebut dapat dipercayai sebagai sesuatu yang terjadi sebagai akibat tidak adanya suatu kuasa yang mampu mengatur hubungan konflik antar negara yang terjadi, hal ini timbul karena ketidakpercayaan negara terhadap negara lain dalam usahanya mengamankan wilayah perbatasannya. Akibatnya negara sebagai aktor dalam hubungan internasional mengembangkan persepsi ancaman yang ditimbulkan dari upaya aktor negara lain di perbatasannya, sehingga pada akhirnya setiap aktor negara mengembangkan dan membangun konsep keamanannya masing-masing yang menimbulkan persaingan untuk memperkuat sistem pertahanan. Hubungan ini terjadi sebagai akibat interaksi negara dalam sistem internasional yang oleh Wendt dalam tulisannya mengenai "*anarchy is what state make of it*" disebut sebagai sebuah struktur, dimana hal-hal yang terjadi terhadap diri aktor dan lingkungannya membentuk interaksi dan sebaliknya interaksi tersebut membentuk bagaimana aktor bersikap dan membentuk lingkungan (Zehfus, 2004). Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur, sikap dan posisi aktor-aktor internasional dibentuk secara terus menerus dan perubahan dapat saja terjadi setiap saat sesuai dengan kepentingan antar aktor dan interaksi yang terjadi diantara mereka seperti yang dinyatakan oleh Viotti dan Kauppi (Viotti & Kauppi, 2012) "*... views the world as a project always under construction...*". Terjadinya perubahan dalam hubungan internasional sebagaimana yang telah disebutkan tadi disebabkan juga oleh pertimbangan negara melihat identitasnya yang pada akhirnya menentukan apa dan sejauh apa kepentingan yang ingin dicapai olehnya.

Konsep Indo-Pasifik adalah konsep yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan melihat adanya upaya China untuk memperluas jangkauan pengaruhnya terhadap dunia. Amerika Serikat dalam sistem hirarki dunia selalu menempatkan bahwa dirinya adalah suatu bentuk kekuatan dunia yang tidak dapat digantikan posisinya oleh aktor lain sehingga secara

terus menerus melakukan upaya untuk menekan aktor lain yang mencari jalan untuk dapat menyaingi kekuatannya. Dalam hal ini Amerika Serikat mengidentifikasi bahwa dirinyalah yang merupakan satu-satunya *super power* yang mampu mempengaruhi sistem internasional, sementara China melihat bahwa sistem internasional tidaklah sempurna dan melihat adanya celah untuk membangun struktur yang sesuai dengan tujuan-tujuan politik luar negerinya dalam bentuk *Belt Road Initiative*. Melihat fakta tersebut Amerika Serikat secara unilateral menyatakan bahwa motif internasional China perlu dihambat, dalam hal ini Amerika Serikat menentukan sendiri siapa dan dimana rivalitasnya.

Sebagai negara dunia ketiga posisi dan peranan India sebenarnya tidaklah terlalu signifikan terlihat, dan dalam politik internasional pada masa Perang Dingin, India membentuk peran lebih besar di wilayah Asia Selatan. Perubahan dunia pasca Perang Dingin, mengubah persepsi India untuk melihat bahwa kawasan lain memiliki nilai strategis yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanannya. Kebijakan *Look East Policy* merupakan salah satu kebijakan yang populer dalam politik luar negeri India, dengan melihat bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang secara ekonomi mampu memberikan keuntungan terhadap pembangunan nasional India. Namun demikian kebijakan tersebut tidak diikuti dengan pengembangan faktor-faktor keamanan internal India, walaupun disadari bahwa wilayah Samudera Hindia adalah bagian dari kepentingan nasionalnya namun sepertinya tidak dikelola dengan baik sampai adanya serangan teroris di Mumbai. Barulah dalam strategi Indo-Pasifik yang dikemukakan oleh Amerika Serikat dengan mendorong India untuk berperan lebih aktif di kawasan dan wilayah luarnya seperti yang disampaikan oleh Hillary Clinton mengenai *act east*, India menentukan sasaran strategisnya. Pengaruh ekonomi China serta pergerakan militernya yang mencapai Afrika, membuat ruang gerak India di kawasan Samudera Hindia menjadi terbatas. Identitas kawasan yang dibangun di Asia Selatan sepertinya tidak membuat negara-negara yang menjalin hubungan dengan China memiliki ikatan kedekatan dengan India, hal ini bisa dilihat dari sikap negara-negara tersebut yang memprioritaskan kepentingan China di negaranya dibandingkan dengan permintaan India. Oleh karenanya India perlu untuk memposisikan kembali kedudukannya di kawasan dengan mempererat hubungan diplomasi dan



ekonominya dan sekaligus menggalang kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama terhadapnya di kawasan. Namun demikian rivalitas yang tercipta antara India dan China tidak membuat India dengan serta merta menjadikan China sebagai mitra strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan *love and threat* dapat dilihat dari hubungan perdagangan dan pengaturan strategi pertahanan laut kedua negara tersebut dalam konsep penciptaan keseimbangan kekuatan masing-masing negara memperkuat posisi strategis pertahanan maritimnya dengan meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata dan bersaing menggalang kerjasama dengan *littoral states* dan lebih lanjut bagi India bersama dengan negara-negara *Quad* memberikan efek membendung (*deterrence effect*) terhadap China. Walaupun rivalitas terbangun antara kedua negara, namun sepertinya tidak memberikan dampak terlalu besar dalam hubungan perdagangan yang justru mengalami peningkatan. Kedua negara saling membutuhkan dalam hal investasi dan kemudahan akses terhadap masing-masing pasar. Mungkin hal inilah yang mendasari bahwa dibalik rivalitas yang terjadi, India tidak memiliki keinginan lebih besar untuk memprovokasi situasi menjadi buruk bagi hubungan kedua negara tersebut.

## Referensi

- Bharadwaj, N. (n.d.). *therisingnepal*. Retrieved Februari 13, 2020, from <http://therisingnepal.org.np/news/31219>
- Chacko, P. (2014, April 23). The Rise of the Indo-Pacific: Understanding ideational Change and Continuity in India's Foreign Policy. *Australian Journal of International Affairs*, 68(4), 435. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2014.891565>
- Dabas, M. (2017, June 23). *Home:News:India: Indiatimes.com*. Retrieved March 27, 2020, from [indiatimes.com: https://www.indiatimes.com/news/india/here-is-all-you-should-know-about-string-of-pearls-chinas-policy-to-encircle-india-324315.html](https://www.indiatimes.com/news/india/here-is-all-you-should-know-about-string-of-pearls-chinas-policy-to-encircle-india-324315.html)
- Dellios, R., & Ferguson, R. J. (2011, September-December). Sino-Indian Sea Power in a Regional Context. *Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies*, 9(2), 15-34.

- Department of State United State of America. (2019, November 4). *state.gov*. Retrieved Februari 13, 2020, from <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf>
- Global Fire Power. (2020, Maret 27). *globalfire.com*. Retrieved from [globalfire.com: https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=india&country2=china&Submit=COMPARE](https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=india&country2=china&Submit=COMPARE)
- Hemmings, J. (2017, November 09). *the Interpreter*. Retrieved Februari 15, 2020, from LOWY Institute.org: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/reborn-quadrilateral-deter-china>
- Hill, R. (2002). *Southeast Asia People, land and economy*. Crows Nest NSW, Australia: Allen & Unwin.
- Indian Navy. (2019, September 25). *Home: Indiannavy.nic.in*. Retrieved Maret 25, 2020, from [indiannavy.nic.in: https://www.indiannavy.nic.in/content/exercise-malabar-2019](https://www.indiannavy.nic.in/content/exercise-malabar-2019)
- Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy). (2007, May). *Aldelis.net*. Retrieved Februari 27, 2020, from [Aldelis.net: http://aldeilis.net/mumbai/1686.pdf](http://aldeilis.net/mumbai/1686.pdf).
- Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy). (2015, January 25). *indianNavy*. (S. J. Singh, S. S. Parmar, & J. S. Sachdeva, Eds.) Retrieved Februari 25, 2020, from [indiannavy.nic.in: https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian\\_Maritime\\_Security\\_Strategy\\_Document\\_25Jan16.pdf](https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf)
- International Maritime Organization. (2019, April 01). *IMO*. Retrieved Februari 15, 2020, from [IMO.org: http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Pages/Default.aspx](http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Pages/Default.aspx)
- Izuyama, M. (2019). *nids.mod.go*. Retrieved Februari 01, 2020, from [nids.mod.go.jp: http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-asian\\_e2019\\_01.pdf](http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2019/east-asian_e2019_01.pdf).
- Jaishankar, D. (2019). *Acting East: India In The Indo-Pacific*. Chanakyapuri, New Delhi: Brookings Institution India Center.



- mea.govt.in. (2018, August). *mea.govt.in*. Retrieved Maret 16, 2020, from mea.govt.in: <https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-ASEAN-Relations-August-2018.pdf>
- Medcalf, R. (2018). Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific. (G. Rozman, & J. C. Liow, Eds.) *International Relations and Asia's Southern Tier*, 11. doi:[https://doi.org/10.1007/978-981-10-3171-7\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-10-3171-7_2)
- Mishra, R. (2015, November 13). *Researchgate*. Retrieved Februari 01, 2020, from Researchgate: <https://www.researchgate.net/publication/283731504>
- Naidu, G. V. (2004). Looking East: India and Southeast Asia *the Institute of International Relations (IIR)- Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) Second Roundtable Conference* (pp. 190-204). Taipei: the Institute of International Relations. Retrieved Maret 20, 2020, from [https://www.rchss.sinica.edu.tw/capas/publication/newsletter/N27/2704\\_02.pdf](https://www.rchss.sinica.edu.tw/capas/publication/newsletter/N27/2704_02.pdf)
- Nelly, J. (2019, January 16). *Home: Society: Defence: ibtimes.co.in*. Retrieved Maret 27, 2020, from ibtimes.co.in: <https://www.ibtimes.co.in/threat-india-china-surpasses-all-other-nations-key-military-technology-79013>.
- Paleri, P. (2012). Maritime Challenges and Priorities in Asia: an Indian Perspective. In J. H. Ho, & S. Bateman, *Maritime Challenges and Priorities in Asia: Implications for Regional Security* (p. 274). USA and Canada: Routledge.
- Palit, A. (2015, Juni 02). *Brookings*. Retrieved Maret 16, 2020, from Brookings.edu: <https://www.brookings.edu/research/india-southeast-asia-relations-enhancing-mutual-benefits/>
- Pranav, D. (2019, October 11). *Home: Team India Blogs: investindia.gov.in*. Retrieved Maret 27, 2020, from investindia.gov.in: <https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/five-facts-about-india-china-trade-and-investment-relations-indian-perspective>
- Rajendram, D. (2014). *India's New Asia-Pacific Strategy: Modi Act East*. Lowy Institute. Retrieved Maret 25, 2020, from <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/indias-new-asia-pacific-strategy-modi-acts-east.pdf>

- Rej, A. (2020, Februari 24). *News18: Opinion*. Retrieved Maret 20, 2020, from News18.com: <https://www.news18.com/news/opinion/dalliance-no-more-how-india-us-defence-trade-relationship-matures-over-years-2510343.html>
- Roblin, S. (2020, February 26). *sites: sebastienroblin: forbes.com*. Retrieved Maret 25, 2020, from forbes.com: <https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2020/02/26/modi-and-trump-sign-35-billion-helicopter-deal-more-could-follow/#577b7d3523aa>
- Rumley, D., Doyle, T., & Chaturvedi, S. (2012, June). 'Securing' the Indian Ocean? Competing regional security constructions. *Journal of the Indian Ocean Region*, 8(1), 1-20. doi: 10.1080/19480881.2012.683623
- Scott, D. (2017, November 28). *Capability analysis, Indo-Pasific: Cimsec.org*. Retrieved Maret 27, 2020, from cimsec.org: <http://cimsec.org/chinese-maritime-strategy-indian-ocean/34771>
- Sheliya, M., & Joshi, H. (2019, July 01). India's Maritime Wall in the Indo-Pacific Region. *Sigma Iota Rho Journal of International Relations*. Retrieved Maret 21, 2020, from <http://www.sirjournal.org/research/2019/7/1/indias-maritime-wall-in-the-indo-pacific-region>
- The Times of India. (2019, October 13). *International Business News: indiatimes.com*. Retrieved Maret 27, 2020, from timesofindia.indiatimes.com: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/finally-china-agrees-to-work-on-balance-of-trade/articleshow/71560730.cms>
- The World Bank. (2019, Oktober 25). *worldbank*. Retrieved Maret 11, 2020, from worldbank.org: <https://www.worldbank.org/en/country/india/overview>
- Todi, S. (2019, December 18). *The Pulse: Security, East Asia, South Asia*. Retrieved Maret 21, 2020, from thediplomat.com: <https://thediplomat.com/2019/12/india-gets-serious-about-the-indo-pacific/>
- U.S Department of State. (2005, March 25). *Background Briefing: state.gov*. Retrieved Maret 25, 2020, from 2001-2009.state.gov: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/43853.htm>



- U.S Department of State. (2019, December 18). *Media Note: State.gov*. Retrieved Maret 25, 2020, from State.gov: <https://www.state.gov/highlights-of-2019-u-s-india-22-ministerial-dialogue/>
- Vespe, M., Greidanus, H., & Alvarez, M. A. (2015, April 28). The declining impact of piracy on maritime transport in the Indian Ocean: Statistical analysis of 5-year vessel tracking data. *Elsevier*, 9-15. Retrieved Maret 16, 2020, from <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0308597X15001001?token=E60CE2B4EFC59FF9AD2D07B96AA49FD73198B5E01AF987B641165733CDDFF82263591215D0E698CD8F60098FF30767878>
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International Relations Theory* (5 ed.). Longman Pearson.
- Wagner, I. (2020). *Number of pirate attacks against ships worldwide from 2010 to 2019*. statista.com. Retrieved Maret 16, 2020, from <https://www.statista.com/statistics/266292/number-of-pirate-attacks-worldwide-since-2006/#statisticContainer>
- Zehfus, M. (2004). *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.